

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak keruntuhan kekuasaan Presiden Soeharto ditahun 1998, masyarakat Indonesia mulai memperoleh akses informasi yang lebih luas dan terbuka. Berbagai hal yang selama era Presiden Soeharto tabu untuk dibicarakan, menjadi bahan perbincangan masyarakat luas dan bahkan menjadi pertanyaan kritis dan menggugat hal-hal yang sudah diterima menjadi suatu kebenaran.

Diantara pertanyaan penting adalah peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, versi yang diakui adalah keterlibatan penuh Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan versi lain tidak diakui bahkan dilarang beredar. Dalam rangkaian peristiwa 1965 tersebut, terdapat juga berbagai pertanyaan turunan seperti keterlibatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) serta kekuatan pendukung PKI dan Presiden Sukarno lainnya. AURI dalam G-30-S dinilai terlibat karena banyaknya fakta yang memberatkan AURI seperti keterlibatan beberapa perwira AURI, dukungan pimpinan AURI pada 1 Oktober 1965 serta digunakannya berbagai fasilitas AURI, seperti pangkalan Udara Halim pada 1 dan 2 Oktober. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sempat dijawab oleh beberapa purnawirawan perwira tinggi AURI lewat sebuah buku yang diedit Aristides Katoppo, berjudul *Menyingkap Kabut Halim 1965 (MKH 196)* serta berbagai biografi atau otobiografi para perwira AURI yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Adapun biografi atau

otobiografi yang dimaksud meliputi Omar Dani (Men/Pangau 1962-1965), Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Wisnu Djajengminardo (Pangkoops PAU Halim 1965), Heru Atmodjo (Asisten Direktur Intelejen AURI 1965), Roesmin Nurjadin (Men/Pangau 1966) dan Ashadi Tjahjadi (Pangkoops PAU Husein Satranegara 1965),

Buku MKH 1965 dan berbagai biografi atau otobiografi di atas, dapat disebut sebagai pembelaan purnawirawan AURI dalam kaitan peristiwa G-30-S. Hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan buku tersebut adalah sumber informasinya yang berasal dari kalangan internal AURI. MKH 1965 juga disusun dengan pokok deskripsi permasalahan saat terjadinya G-30-S saja, tanpa melihat rangkaian kontinuitas kesejarahan institusi AURI.

Perbincangan keterlibatan AURI dalam peristiwa G30-S memang cukup dibuktikan dengan rangkaian fakta pada tahun 1965. Namun perkembangan suatu institusi seperti AURI, seharusnya dipandang secara komprehensif. Apalagi kepemimpinan Men/Pangau Omar Dani pada tahun 1965 adalah hasil pergulatan internal dan eksternal AURI sejak masa Suryadarma. Dengan demikian, pengkajian sejarah politik institusi AURI pada 1965-1966 harus melibatkan AURI pada masa sebelumnya dengan melihat dinamika pergulatan politik kekuasaan di dalamnya.

Salah satu bentuk dinamika dalam institusi AURI adalah proses reorganisasi militer pada tahun 1962. Reorganisasi AURI 1962, lahir sebagai suatu bentuk desakan eksternal atas kegagalan AURI memberikan pengamanan

dalam pertempuran Aru. Selain hal tersebut, reorganisasi juga lahir atas desakan kegagalan KSAU Suryadarma melakukan kebijakan personel.

Adapun usulan pelaksanaan integrasi Angkatan Perang sebagai bagian langkah reorganisasi dimulai sejak masa Kabinet Karya (1958). Dalam panitia usulan yang dipimpin Letjen Hidayat, dihasilkan konsepsi bahwa Angkatan Bersenjata haruslah memiliki panglima sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi kepala staf angkatan dan kepolisian. Langkah reorganisasi tersebut kemudian dilegalkan dalam Keputusan Presiden No.225/PLT/1962. Kekuatan militer yang awalnya terdiri empat angkatan dengan wadah terpisah, disatukan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang langsung berada dibawah komando Presiden Sukarno. Kepala staf angkatan dan kepolisian, gelarnya diubah menjadi panglima angkatan dengan status menteri.¹ Sebagai panglima tertinggi, presiden dapat dengan mudah merangkul salah satu angkatan kepihaknya, apabila diperlukan untuk mendukung kebijakan politiknya.

Pemberlakuan Keppres, melengkapi proses "Sukarnoisasi" angkatan bersenjata. Sebelumnya, Presiden Sukarno memindahkan kedudukan AH. Nasution dari pucuk pimpinan Angkatan Darat menjadi kepala staf angkatan bersenjata yang fungsinya terbatas pada pembinaan. Dalam pandangan Sukarno, sejak 1959 Nasution memiliki pengaruh yang besar dalam angkatan perang dan

¹ Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid III (1960-1965)*, (Mabes TNI, Jakarta: 2000), hal. 1-2.

politik nasional, sehingga gerakannya perlu dibatasi.² Adapun jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kemudian dipegang oleh Letjen Ahmad Yani.

Dengan demikian, proses re-organisasi angkatan bersenjata telah berhasil menempatkan Presiden Sukarno dalam posisi sentral perpolitikan di Indonesia. Presiden Sukarno kemudian menjadikan pandangan politik yang merangkul kubu Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom) sebagai landasan persatuan nasional. Secara politik, gagasan Nasakom tersebut diterjemahkan sebagai strategi tiga kaki yang menempatkan ketiga kelompok nasional tersebut dalam kabinet pemerintahan. Namun, gagasan tersebut mendapat kritik dan penolakan dari Partai Islam Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Nahdlatul Ulama dan juga Angkatan Darat. Kritik tersebut terutama didasarkan kecurigaan terhadap latar belakang kaum komunis yang pernah mencoba melakukan aksi kudeta di tahun 1948, serta sentimen terhadap kaum komunis yang dinilai anti tuhan. Dengan demikian, konsepsi Nasakom presiden yang menginginkan masuknya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan menghadapi hambatan.

Selain dari sikap kritis AD terhadap strategi tiga kaki presiden, di kalangan angkatan bersenjata juga terdapat perbedaan tajam dalam menanggapi perilaku politik Sukarno. Terhadap rencana pembentukan Angkatan Kelima misalnya, AD dengan tegas bersikap menolak, sedangkan Angkatan Laut dan Kepolisian bersikap penuh kehati-hatian dengan tidak memberikan tanggapan. Dukungan terhadap Angkatan Kelima justru datang dari AURI. Dukungan AURI terhadap Angkatan Kelima, yang bersamaan dengan dukungan PKI menciptakan suatu

² MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Pen. Satrio Wahono et al. (Jakarta: Serambi, 2005), hal. 533

kecenderungan politik bahwa AURI dan PKI berada pada satu sisi, berhadapan dengan AD pada sisi yang lainnya.

Pada 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September (G-30-S)³ di Jakarta yang dipimpin Letkol (AD) Untung melakukan aksi penculikan dan pembunuhan tujuh perwira AD, yakni Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI S. Parman, Mayjen TNI Haryono MT, Brigjen TNI Sutoyo S, Brigjen TNI DI Pandjaitan serta Lettu Czi Pierre Tendean. Di Jogjakarta, G-30-S juga membunuh Kolonel Inf. Katamso dan Letkol Inf. Sugiyono.⁴ Aksi pembunuhan ini, oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjen Soeharto, disimpulkan sebagai kudeta terhadap presiden. Mayjen Soeharto kemudian mengambil inisiatif mengkoordinasikan kelompok militer untuk melakukan gerakan kontra-kudeta penghancuran G-30-S. Pasca G-30-S posisi presiden semakin terjepit, karena kedekatan presiden dengan PKI serta kecurigaan keterlibatan presiden dalam G-30-S.

Peristiwa G-30-S memiliki implikasi terhadap AURI sebagai institusi pendukung presiden. Apalagi dalam peristiwa G-30-S, AURI dianggap terlibat dalam mempersiapkan markas G-30-S di Halim serta keterlibatan aktif beberapa perwiranya, seperti Sujono, Gathut Sukrisno dan Heru Atmodjo. Hal ini berujung pada pergantian secara bergantian dua pucuk pimpinan AURI, yakni Omar Dani dan Sri Mulyono Herlambang. Situasi politik yang mengalami tahap de-

³ Studi ini menggunakan istilah G-30-S, tanpa akhiran PKI. Istilah ini merujuk kepada kondisi obyektif, bahwa sampai dengan tesis ditulis, persoalan siapa yang bertanggung-jawab atas terbunuhnya tujuh perwira AD pada 1 Oktober 1965 masih menjadi perdebatan para sejarawan.

⁴ *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 1994), hal. 93-111

sukarnoisasi membuat AURI mengambil langkah reorganisasi serta pengurangan kiprahnya dalam perpolitikan nasional.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan AURI menjadi obyek kajian dalam penelitian tesis. Hubungan AURI dengan Presiden Sukarno antara 1962 hingga 1966 adalah suatu gerak sejarah yang kompleks, meliputi masa kejayaan ditahun 1962-1965 dan berakhir secara tragis ditahun 1965-1966. Ketertarikan ini melahirkan pertanyaan akademis dalam bentuk kajian tesis terhadap politik militer AURI pada masa reorganisasi AURI 1962 hingga dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Selain alasan diatas, ketertarikan penulis terhadap pemilihan topik ini didasarkan kelangkaan historiografi yang mengkhususkan studi politik militer AURI pada masa Demokrasi Terpimpin. Secara umum, para peneliti lebih tertarik untuk melakukan kajian mengenai Sukarno, Angkatan Darat atau PKI, mengikuti pola kekuasaan hasil kajian Herbeth Feith.⁵

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berusaha mendeskripsikan politik militer AURI dalam kekuasaan Sukarno 1962-1966. Secara temporal, pokok kajian diawali sejak pelaksanaan reorganisasi angkatan bersenjata pada tahun 1962 hingga saat dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 yang salah satu akibatnya berujung pada pergantian panglima AURI. Penelitian tesis ini berusaha menempatkan AURI dalam konteks politik militer, yaitu sebagai suatu

⁵ Lihat Herberth Feith, *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).

sikap yang tercermin dari tindakan yang dilakukan AURI dalam menanggapi perilaku atau tindakan politik nasional. Adapun sikap yang merupakan cerminan dari institusi AURI, dilahirkan dari kebijakan pimpinan AURI. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan pimpinan AURI menjadi dimaknai sebagai sikap politik AURI secara institusional. Namun demikian, ada kalanya Men/Pangau juga bertindak di luar batas koordinasi yang akibatnya justru mempertaruhkan reputasi institusi AURI itu sendiri. Hal inilah yang terjadi dalam kasus AURI pada tahun 1965, pada saat Men/Pangau Omar Dani mengeluarkan surat pernyataan dukungan terhadap aksi G-30-S.

Dalam memahami proses perubahan politik di tahun 1965 misalnya, penelitian tesis ini menempatkan AURI sebagai pendukung Presiden Sukarno. Keterlibatan AURI dalam beberapa fase pelaksanaan G-30-S, pada dasarnya merupakan keterlibatan individu-individu yang lepas dari koordinasi institusi. Selain itu, keterlibatan individu tersebut juga lebih didorong rasa percaya diri bahwa G-30-S dilakukan untuk menyelamatkan Panglima Tertinggi ABRI, Presiden Sukarno, bukan kesetiaan kepada PKI. Namun demikian, karena individu yang memiliki keterlibatan merupakan individu penentu dalam institusi AURI, maka akibatnya AURI secara institusional harus bertanggung-jawab atas keterlibatan tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok pertanyaan penting dalam penelitian tesis meliputi:

1. Bagaimana proses dukungan AURI kepada Presiden Sukarno berlangsung ?

2. Bagaimana posisi AURI dalam peristiwa G-30-S 1965 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian tesis bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif politik militer AURI pada masa pemerintahan Sukarno antara pelaksanaan re-organisasi militer pada tahun 1962 hingga dikeluarkannya Supersemar pada 11 Maret 1966. Secara akademis studi ini diharapkan memperkaya kajian sejarah politik militer Indonesia serta memotivasi untuk penelitian lanjutan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang langkah-langkahnya mengacu kepada penelitian sejarah secara umum, seperti yang dikemukakan Gottschalk dan Kuntowijoyo, yakni: pengumpulan sumber informasi (*heuristik*), kritik ekstern dan intern terhadap bahan sumber, interpretasi terhadap fakta yang ada dan berakhir dengan tahapan sintesa atas keseluruhan yakni dalam bentuk penulisan sejarah (*historiografi*).⁶

Sebagai kajian sejarah, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif yaitu bertujuan seperti dikatakan Sartono Kartodirdjo, yakni "ingin membuat deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksikan apa yang terjadi serta diuraikan sebagai cerita, dengan perkataan lain kejadian-kejadian

⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Pen: Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 65-68. dan juga Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hal. 91-108.

penting diseleksi dan diatur menurut poros waktu sedemikian sehingga tersusun sebagai cerita”.⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian, melibatkan disiplin ilmu politik. Pendekatan politik digunakan, karena fokus penelitian membahas hubungan kekuasaan antara presiden sebagai eksekutif dan militer sebagai salah satu bagian institusi di dalamnya.

1.5 Sumber Sejarah

Secara umum, sumber sejarah dari segi urutan penyampaiannya dibagi menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari arsip, dokumen dan laporan sezaman. Dalam penelitian ini, sumber kearsipan didapat dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu berupa catatan pidato Presiden Sukarno, surat-surat keputusan presiden serta sumber sejarah lisan rekaman wawancara dengan Sri Bima Ariotedjo (tokoh AURI tahun 1960-an). Dokumen yang didapat di Markas Besar TNI-AU di Cilangkap, meliputi surat keputusan dan pidato Men/Pangau serta penerbitan resmi doktrin TNI-AU, *Swa Bhuana Paksa* tahun 1965. Sumber primer juga meliputi keterangan surat kabar, yakni: *Majalah Angkasa*, *Pikiran Rakyat*, *Berita Yudha* dan *Kompas*. Penelitian ini memanfaatkan sumber lisan, yakni dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang mengetahui terhadap keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal.9.

Sedangkan sumber sekunder dalam kajian tesis, meliputi kajian penelitian terhadap kurun waktu tersebut (1962-1966), baik yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian, jurnal atau majalah ilmiah, maupun yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Buku yang cukup penting dalam penelitian tesis adalah buku suntingan Aristides Katoppo dkk yang berjudul *Menyingkap Kabut Halim*. Buku yang diterbitkan Sinar Harapan ini, berisi paparan deskriptif mengenai posisi AURI dalam peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) yang didasarkan terutama kepada pengakuan para pelaku sejarah. Selain itu, terdapat juga otobiografi Omar Dani, Sri Mulyono Herlambang dan Heru Atmodjo yang dalam proporsinya masing-masing memberi penjelasan dari sudut pandang mereka secara subyektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, diperlukan adanya penataan dan penentuan fakta kausal, peristiwa dan fakta akibat. Dengan demikian, penyusunan suatu historiografi mengikuti prinsip-prinsip organisasi.

Berdasarkan hal diatas, studi dalam tesis dibagi dalam enam bab, meliputi:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, sumber sejarah serta sistematika penulisan.

Bab II AURI dan Politik Militer Menjelang Reorganisasi (1959-1962)

Bab ini berusaha menelusuri politik militer di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga pelaksanaan re-organisasi tahun 1962. Dalam bab ini diuraikan

catatan singkat AURI, kiprah AURI dalam politik nasional serta Peristiwa Aru yang menjadi sebab reorganisasi dan pergantian kepemimpinan AURI.

Bab III: AURI dan Politik Militer Sejak Reorganisasi hingga Peristiwa G-30-S (1962-1965)

Bab ini memaparkan sikap serta perilaku politik AURI antara 1962 hingga terjadinya G-30-S 1965. Fokus pembahasan adalah reorganisasi AURI masa Men/Pangau Omar Dani serta peristiwa politik menjelang meletusnya G-30-S, seperti konfrontasi Malaysia dan wacana Angkatan Kelima.

Bab IV: AURI dan Peristiwa G-30-S

Bab ini mendeskripsikan posisi AURI pada peristiwa G-30-S, terutama mengenai dugaan keterlibatan AURI seperti keterlibatan perwira AURI, penggunaan fasilitas AURI serta dukungan Men/Pangau Omar Dani terhadap G-30-S.

Bab V: Akhir Sebuah Tragedi: AURI antara G-30-S dan Supersemar

Bab ini mendeskripsikan institusi AURI antara Peristiwa G-30-S hingga di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa tersebut meliputi, akhir kepemimpinan Men/Pangau Omar Dani dan kepemimpinan Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang. Pada bahasan ini dijelaskan sikap politik AURI pasca G-30-S hingga dikeluarkannya Supersemar.

Bab VI: Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan secara garis besar inti penelitian serta memberi suatu paparan kontekstual terhadap politik militer di masa depan.